ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Oleh :

Paksi Seto

Banyaknya Angkutan kota di Bandar Lampung yang beroperasi membuat pemerintah kota Bandar Lampung mengupayakan untuk terus memberi pengawasan secara khusus bagi angkutan umum ini. Kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap izin trayek merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan angkutan umum. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, maka Pemerintah wajib menyediakan angkutan orang di jalan raya yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, untuk itu pemerintah mengatur angkutan kota sebagai moda transportasi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pengawasan kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung terhadap izin trayek angkutan kota? (2) Apakah sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung terhadap angkutan kota yang melakukan pelanggaran peraturan izin trayek?

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data diolah melalui proses seleksi data, klasifikasi, dan sistematisasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) pengawasan yang dilakukan Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam rangka penegakan Hukum dan sebagai filterisasi bagi mikrolet yang tidak sesuai dengan *regulasi* yang ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) sanksi bagi angkutan kota yang melanggar izin trayek langkah awalnya diberikan surat teguran oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Kemudian memberikan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan

mulai dari penilangan sampai pada penahanan kendaraan dan pencabutan izin trayek angkutan. Saran dalam penelitian ini (1) Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung lebih bekerjasama lagi dengan P3ABL agar tidak terjadi kesalah pahaman informasi yang ingin disosialisasikan, dan P3ABL harus lebih mengkoordinir semua pemilik dan pengemudi mikrolet yang beroperasi supaya tercipta kerjasama baik dan menciptakan kenyamanan bertransportasi. (2) Para pemilik dan pengemudi angkutan kota sebaiknya lebih cerdas dan peka terhadap regulasi yang mengatur tentang izin trayek sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Izin trayek, Pengawasan, Sanksi